

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Nasution, & I Gusti Ayu Lakshana, 2022, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat (6) dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia, *Journal Of Social Studies* Vol. 3 No. 2. [Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil \(PPNS\) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat \(1\) Jo. Pasal 6 Ayat \(1\) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat \(6\) dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia](#)
- Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, 2025, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary* Vol. 14 No. 1. [PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA | Jurnal Hukum Dan Keadilan](#)
- Asmarawati Tina, *Sosiologi hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 135. [Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan - Bintangpusnas Edu](#)
- Eka Kurniawatie, 2025, The Role Of Indonesian National Police (POLRI) In Conducting Investigation According To The Criminal Justice System In Relation To Law No. 2 Of 2002 On The Indonesian National Police And Law No. 8 Of 1981 On The Criminal Procedure Code (KUHP), *Jurnal Multidisiplin Shombu* Vol. 5 No. 1. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/download/6108/473_1
- Eka Suryani, Nelvitta Purba, 2024, Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. [Repository UMN AW: PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN \(Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang\)](#)
- Faraiman Laila, Laka Dodo Laia, 2023, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Vol. 2 No. 2, *Jurnal Panah Keadilan*. [PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING | JURNAL PANAH KEADILAN](#)

- George Mason, Hudy Yusuf, 2024, Tinjauan Terhadap Kontribusi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kriminal, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol: 1 No: 2. [143.TINJAUAN+TERHADAP+KONTRIBUSI+ILMU+KEDOKTERAN+FORENSIK+DALAM+PENYELESAIAN+KASUS+KRIMINAL \(3\).pdf](#)
- Hafizha Ilma Qadriina, 2024, “Manajemen Bencana Industri Pada Kasus Ledakan Pabrik Petasan Kosambi Tangerang Tahun 2017”, *Institute for Advance Science, Social and Sustainable Future*. [Manajemen bencana industri pada kasus ledakan pabrik petasan Kosambi, Tangerang tahun 2017 | Human Error and Safety](#)
- Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, 2016, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan No.226/PID.B/2014/PN.Smg)”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No.4. [TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN BAHAN PELEDAK LOW EXPLOSIVE TANPA IZIN \(BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.226/PID.B/2014/PN.Smg\) | Eko Soponyono, Umi Rozah | Diponegoro Law Journal](#)
- Irmayanti, Miftahul Jannah, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, PT. Mifandi Mandiri Digital. [Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif | Penerbit Mifandi Mandiri Digital](#)
- Jai P. Agrawal, 2015, *High Energy Materials : Propellants, Explosive and Pyrotechnics*, Willey-VCH. [High Energy Materials, Propellants, Explosives and Pyrotechnics, Jai Prakash Agrawal | Request PDF](#)
- Jamila, 2020, Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23 N0. 1. [Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam | Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam](#)
- Kharisma Kusuma Wardhani dan Fakultas Hukum, 2023, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak”, *Respiratory Unisulla, Fakultas Hukum*. [Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak \(Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd\) Unissula Repository](#)

- Krisna Noviawan, Basoddin, La Ode Muhram, 2024, Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Ancaman Radikalisme di Masyarakat Vol. 6 No. 2, *Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara*. [PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN RADIKALISME DI MASYARAKAT | Sultra Law Review](#)
- M. Fadel Roby Syahputra *et. Al*, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Vol 3 No. 2*. [Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak \(Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk\) | PAMPAS: Journal of Criminal Law](#)
- Margarrick Yoga Adinata Putra & A.A. Ngurah Oka Yudistira, Tinjauan Yuridis Koordinasi Kewenangan Penyidik Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penyidik Kepolisian Negara Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara Vol. 15 No. 9 Tahun 2025 Hlm. 508-524*. [TINJAUAN YURIDIS KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum](#)
- Mauliza Setiawan & Adi Hermansyah, 2018, “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol. 2(1). jim.usk.ac.id
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. [Asas-Asas Hukum Pidana / Moeljatno | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi](#)
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. [Teori-teori dan kebijakan pidana - Muladi, Barda Nawawi Arief - Google Books](#)
- Natalia Orient Laloan, 2020, Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP. [KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP | LEX CRIMEN](#)
- Pamudji Utomo, Totok Siswanto, 2020, “Clinical Profile of Patients with Manus Fracture Caused by Firecracker Blast”, *Indonesian Journal of Medicine Masters Program in Public Health Universitas Sebelas Maret*. [Clinical Profile of Patients with Manus Fracture Caused by Firecracker Blast | Indonesian Journal of Medicine](#)

- Panah Keadilan, 2003, Analisis Unsur Subjektif dan Objektif Tindak Pidana Menurut D. Simons dan G. A. Van Hamel, *Jurnal Panah Keadilan*.
- Petrus Soerjowinoto, 2018, “Metode Penulisan Karya Hukum”, Universitas Katolik Soegijapranata. Hlm 17. [P Soerjowinoto - Google Scholar](#)
- Putra, M. E., Khair, A., 2025, Unsur-Unsur Tindak Pidana Ilmu Hukum Pidana, *Jurnal Imiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelike Bijzondere Strafbepalingen” (STBL, 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Tugas Kepolisian.
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rizal Sanrego, 2023, Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus Vol. 3 No. 3, *Journal Terekam Jejak*. [Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus | Jurnal Terekam Jejak](#)
- Sciencedoze, 2022, Science, Classification of Explosive, *Sciendoze.com* [Classification of Explosives](#)

Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Eresco.

Teja Sukmara, 2019, Rekayasa Bahan Peledak Pada Struktur Kompleks di Litologi Limestone Untuk Optimalisasi Peformance Dalam Upaya Menurunkan Biaya Penambangan, *Prosiding Temu Profesi Tahunan Perhapi*. [\(PDF\) REKAYASA BAHAN PELEDAK PADA STRUKTUR KOMPLEKS DI LITOLOGI LIMESTONE UNTUK OPTIMALISASI PERFORMANCE DALAM UPAYA MENURUNKAN BIAYA PENAMBANGAN](#)

Tri Wahyudi, Susilo Handayo, dan Rosdiana, 2019, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan di Kota Balikpapan,” *Lex Suprema*, 1–16. [Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan | Wahyudi | LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum](#)

Yudi Krismen Us, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan, *Jurnal Mulia Hukum* Vol. 3 No. 2. [PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK DAN ANTISIPASI DALAM MENGHADAPI PRAPERADILAN | Jurnal Bina Mulia Hukum](#)

